

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi telah membuka wacana baru disetiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan masyarakat semakin berani dan secara terbuka menuntut adanya transparansi dana dan akuntabilitas di setiap penyelenggaraan bernegara. Transparansi dan akuntabilitas akan tercermin bagaimana pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya. Sejalan dengan itu daerah-daerah menuntut kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab, (Halim, 2007: 41).

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintah pada umumnya. Setelah melihat bahwa birokrasi publik selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik bagi rezim yang berkuasa, rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik. karena itu tugas pokok para pembuat keputusan dalam beberapa tahun setelah gerakan reformasi adalah memperoleh kembali kepercayaan masyarakat seraya membuktikan bahwa seluruh proses politik dan pembuatan kebijakan yang terjadi akan memberi keuntungan bagi segenap unsur

masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas birokrasi publik akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia dalam waktu dekat ini, (Halim dan Damayanti, 2007: 55).

Akuntabilitas sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggara Negara yang baik Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Hal ini berarti menyangkut kelayakan atau ketidaklayakan atau kegagalan di bidang pelayanan publik yang merupakan aktivitas utama. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Salah satu tujuan informasi pengelolaan keuangan adalah mengolah pada pertanggungjawaban vertical menjadi pada pertanggungjawaban horizontal. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik, (Achmad, 2011).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2004: 36) salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran (perhitungan APBD), laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan

komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, (Ulum, 2010: 165). Sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disajikan tersebut harus berkualitas, menurut Ulum (2008: 168) kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sebagaimana telah disinggung diawal bahwa penyajian laporan keugan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang berimbas pada membudayannya korupsi sistemik. Maka untuk mengikis korupsi, salah satu caranya adalah dengan membudayakan akuntabilitas yang juga berarti membudayakan membuat laporan keuangan secara baik dan benar (Mursidi, 2010: 4). Melaksanakan akuntabilitas publik yang baik tentu akan meningkatkan penerapan *Good Governance* itu sendiri, selain itu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan akuntabilitas ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai cerminan kinerja internsi pemerintah tersebut.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo adalah salah satu mitra pemerintah, sebagai mitra pemerintah Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan pemerintah Kota serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan *good governance* melalui pelaksanaan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar

dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo memang sudah dilaksanakan namun pada pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya publikasi laporan keuangan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo dan sulitnya akses terhadap informasi tentang kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo, Akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Ini dibuktikan banyaknya SKPD terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Semua badan publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen rencana kerja atau rencana anggaran pada

dinas/satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tidak mengumumkan hasil audit BPK setiap tahunnya.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh pelaksanaan akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo. Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan pernah dilakukan oleh Firmansyah (2013) dengan judul pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pengujian statistik, dapat diketahui bahwa hipotesis yang penulis ajukan diterima yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akuntabilitas publik pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo memang sudah dilaksanakan namun pada pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya publikasi dan informasi mengenai laporan keuangan oleh DPPKAD Kota Gorontalo dan sulitnya akses terhadap

informasi tentang kegiatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo.

2. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah apakah pelaksanaan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi di Indonesia terutama dalam hal pertanggungjawaban

pengelolaan APBD dan kualitas penyajian laporan keuangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis.

Bagi organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo sebagai informasi untuk perbaikan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Bagi akademik, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam penilaian mengenai akuntabilitas publik dan kaulitas laporan keuangan.

